

MATRIK AKSI HAM 1
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
TAHUN 2024 PERIODE B.12

PEREMPUAN KEPALA KELUARGA YANG TELAH MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS/PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN KOTA

Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Keberhasilan Pelatihan	Kendala dan Tantangan
1	Kabupaten Banyumas	Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Kerajinan Bambu (Desa Kalikesur Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan telah mengikuti pameran dekranasda 2024 di Kota Surakarta dan sudah menjual produknya	Pengelolaan keuangan, manajemen usaha, SDM/tenaga kerja, legalitas, branding dan pemasaran
		Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Olahan Pisang (Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran
2	Kabupaten Blora	Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Bidang Olahan Makanan Pisang dan Singkong (Desa Sumber Agung Kec. Banjarejo Kab. Blora)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran
		Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Tata Rias (Desa Temulus Kec. Randublatung Kab. Blora)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	SDM/Tenaga Kerja, manajemen usaha, permodalan dan pemasaran
3	Kabupaten Cilacap	Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Bidang Bengkel Sepeda Motor (Desa Glempangpasir Kec. Adipala Kab. Cilacap)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, pengelolaan keuangan, manajemen usaha dan SDM/tenaga kerja

No	Kabupaten/Kota	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Keberhasilan Pelatihan	Kendala dan Tantangan
4	Kabupaten Grobogan	Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Bidang Kerajinan Bambu (Desa Lajer Kec. Penawangan Kab. Grobogan)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan telah mengikuti pameran dekranasda 2024 di Kota Surakarta dan sudah menjual produknya	Pengelolaan keuangan, manajemen usaha, SDM/tenaga kerja, legalitas, branding dan pemasaran
		Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Bidang Olahan Makanan Berbahan Baku Lokal (Desa Bologarang Kec. Penawangan Kab. Grobogan)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran
5	Kabupaten Kebumen	Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Bidang Olahan Makanan Berbahan Baku Oyek (Desa Jlegiwinangun Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran
		Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Bidang Sabut Kelapa (Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Pengelolaan keuangan, manajemen usaha, SDM/tenaga kerja, legalitas, branding dan pemasaran
6	Kabupaten Kendal	Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Makanan Olahan Singkong Desa Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran
		Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Olahan Makanan Bahan Baku Bawang Merah (Desa Sendang Kulon Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran

No	Kabupaten/Kota	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Keberhasilan Pelatihan	Kendala dan Tantangan
7	Kabupaten Pemalang	Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Bidang Olahan Makanan Kue Kering (Desa Gembyang Kec. Randudongkal Kab. Pemalang)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran
		Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Bidang Olahan Makanan Kue Kering (Desa Tambakrejo Kec. Pemalang Kab. Pemalang)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran
8	Kabupaten Rembang	Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Makanan Olahan Pisang dan Ketela (Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran
		Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Makanan Olahan Siwalan (Desa Bogorame Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran
9	Kabupaten Temanggung	Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Makanan Olahan Daging Ayam (Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran
		Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Olahan Makanan Singkong (Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran

No	Kabupaten/Kota	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Keberhasilan Pelatihan	Kendala dan Tantangan
10	Kabupaten Wonogiri	Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Makanan Olahan Kedelai (Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran
		Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Makanan Olahan Kedelai (Desa Mangunharjo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri)	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah	Alumni pelatihan menguasai materi yang diikuti mampu menunjang dalam peningkatan kinerja usahanya	Permodalan, bahan baku, legalitas, branding, kemasan dan pemasaran

Semarang, 5 Desember 2024

KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH



DINAS
KOPERASI
EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM
Pemangku Utama Madya
NIP. 19660611 198602 1 001

LAMPIRAN EVALUASI HASIL PELATIHAN (KENDALA DAN TANTANGAN)
PERIODE B.12

Evaluasi Terkait Pengembangan Kapasitas/Pelatihan Kewirausahaan kepada Perempuan Kepala Keluarga bagi OPD di Tingkat Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan	
Tantangan	Kendala
1 SDM Peserta minim pengetahuan dan melek teknologi	1 Kurang optimalnya dukungan Pemerintah Desa
2 Geografis lokasi pelatihan jauh dari Kota	2 Data yang diberikan dari desa kurang update
3 Kondisi Akses ke lokasi minim transportasi dan fasilitas	3 Pergantian peserta mendadak menjelang pelatihan
4 Tidak semua peserta memiliki HP sendiri	4 Kepala Desa mengutamakan Peserta dari pendukung
5 Peserta diwajibkan untuk upload data peserta ke website PK2UMK	5 Jangkauan sinyal Internet dan komunikasi
6 Peserta tidak sesuai data DTKS dan usia produktif	6 Peserta pelatihan yang tidak memiliki basic skill berwirausaha

Semarang, 5 Desember 2024

KEPALA DINAS KOPERASI
USAHAKECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH



DINAS
KOPERASI
EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM
Pemangku Utama Madya
NIP. 9660611 198602 1 001

FORMAT PELAPORAN AKSI 2 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2024 PERIODE B12

PENYAMPAIAN HASIL REVIU KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN PROVINSI (OPD TINGKAT PROVINSI) DAN/ATAU
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERKAIT RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
 YANG DISKRIMINATIF TERHADAP PEREMPUAN

Provinsi : Jawa Tengah.

No.	Judul Rancangan Produk Hukum	Provinsi	Keterangan Rancangan Produk Hukum yang Diskriminatif Terhadap Perempuan <i>*(berdasarkan hasil rewiu yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham).</i>
1.	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan.	Jawa Tengah	Telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak ditemukan hasil rancangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dalam Raperda berdasarkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang dilakukan Kanwil Kemenkumham berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng nomor W.13-PP.04.02-160 tanggal 25 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2.	Pemajuan Kebudayaan.	Jawa Tengah	Telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak ditemukan hasil rancangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dalam Raperda berdasarkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang dilakukan Kanwil Kemenkumham berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng nomor W.13-PP.04.02-160 tanggal 25 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
----	----------------------	-------------	---

Semarang, 2 Desember 2024

Plh. Kepala Biro Hukum

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya



SRI WAHYUNINGSIH, SH

Pembina

NIP. 19691007 199401 2 001

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN
2024 PERIODE B12**

PEMANTAUAN SITUASI PEKERJA ANAK DAN EVALUASI SOSIALISASI MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK

Provinsi : Jawa Tengah – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemantauan Situasi Pekerja Anak di Kabupaten/Kota	Evaluasi tantangan dan Kendala Sosialisasi Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui Pengawas Ketenagakerjaan telah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah terkait dengan pelaksanaan norma ketenagakerjaan. dimana dalam pemeriksaan di perusahaan-perusahaan tersebut terdapat pemeriksaan terhadap norma kerja anak. 2. Dari dilaksanakannya pemeriksaan perusahaan-perusahaan di Kabupaten/Kota tidak ditemukan pekerja anak terutama pada perusahaan formal. 3. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tegal, Kab Purbalingga dan Dinas Surakarta tidak memiliki data terkait pekerja anak karena pekerja anak di perusahaan-perusahaan formal tidak ditemukan. 4. Pekerja anak tidak ditemukan di perusahaan-perusahaan formal karena perusahaan-perusahaan formal sudah mengetahui adanya perlindungan anak yang salah satunya pada undang-undang ketenagakerjaan. Pekerja anak pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur pada Pasal 68 samapi dengan Pasal 75.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pembinaan di perusahaan-perusahaan agar pengusaha untuk menaati peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Pada Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> Penguatan Pengawas Ketenagakerjaan dalam Pencegahan dan Penghapusan Pekerja Anak. Kegiatan FDG tersebut diselenggarakan dengan anggaran dari APBN. Tantangan: 1. Jumlah perusahaan di Jawa Tengah lebih dari 100.000 perusahaan berdasarkan data di WLKP Online. 2. Pekerja anak lebih banyak ditemukan di tempat kerja/perusahaan informal Kendala: 1. Sulit mendapatkan data pekerja anak di sektor informal 2. Keterbatasan jumlah pengawas dan anggaran yang disediakan

Keterangan:

- Pemprov Jawa Tengah melakukan upaya pencegahan pekerja anak melalui program penarikan pekerja anak dari dunia kerja yang sudah rutin dilakukan oleh Disnaker
- Isu pencegahan pekerja anak kemudian dikoordinasikan juga oleh Biro Kesra Prov. Jateng untuk diperluas lingkup sasaran Kab/Kotanya, dan sebagai hasilnya ditemukan 5 Kab/Kota dengan jumlah pekerja anak tertinggi sehingga program sosialisasi maupun follow up kegiatan penarikan pekerja anak difokuskan kepada 5 Kab. yaitu : Cilacap, Pemalang, Demak, Brebes dan Kebumen
- Kegiatan koordinasi masih berjalan dan akan terus dilanjutkan di tahun depan.

Semarang, 03 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Sekretaris



FORMAT PELAPORAN AKSI 4 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2024 PERIODE B12

PENERBITAN KEBIJAKAN TERKAIT UPAYA-UPAYA PENCAPAIAN TARGET KUOTA DAN PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI SEKTOR BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN SWASTA.

Provinsi : Jawa Tengah.

Judul Kebijakan terkait upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor badan usaha milik daerah (BUMD) dan swasta	Jenis Kebijakan	Bunyi Klausul/Pasal	Tanggal Pengesahan
Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Peraturan Daerah	Pasal 19 ayat 1 “Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses rekrutmen tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas”	18 Januari 2023
		Pasal 20 ayat 1 “Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin proses penempatan tenaga kerja dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.”	
		Pasal 21 ayat 1 “Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah maupun Swasta.”	

		Pasal 22 ayat 1 “Pemerintah Daerah memberikan kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.”	
		Pasal 23 ayat 1 dan 2 “(1) Pemerintah Daerah dan BUMD mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Badan Usaha/Perusahaan Swasta mempekerjakan 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”	
		Pasal 24 ayat 1 “Pemerintah Daerah, Badan Usaha/Perusahaan Swasta dan BUMD menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.”	

Pergub Jateng Nomor 4 Tahun 2024 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Peraturan Kepala Daerah	Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada Badan Usaha yang mempekerjakan minimal 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. (2) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada BUMD yang mempekerjakan minimal 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 17 Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa: a. bantuan peralatan kerja; b. program peningkatan kapasitas tenaga kerja; c. uang pembinaan; dan d. bentuk Penghargaan lain, sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.	31 Januari 2024
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/58 Tahun 2022 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah.	Keputusan Kepala Daerah	Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan	15 Desember 2022

		huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah.	
--	--	--	--

Semarang, 2 Desember 2024
Plh. Kepala Biro Hukum
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya

SRI WAHYUNINGSIH, SH
Pembina
NIP. 19691007 199401 2 001



Semarang, 2 Desember 2024

Nomor : 300.1.6 /1800
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaporan Aksi HAM B.12

Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
di -

TEMPAT

Dalam rangka pelaporan pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Periode B.12 (Bulan Desember) Tahun 2024 pada tanggal 28 November s.d. 5 Desember 2024 dan menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah nomor 100.3/75 tanggal 29 November 2024 hal Undangan, dengan hormat kami sampaikan tercatat 34 (tiga puluh empat) Satuan Pendidikan SMA dan SMK Negeri/Swasta di Jawa Tengah (daftar terlampir) sudah menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Sekretaris

\$(ttd)

Syamsudin Isnaini, S.STP, SH, M.H.
Pembina
NIP. 198007171999121001

FORMAT PELAPORAN AKSI 5 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 TAHUN 2024 PERIODE B12

PEMETAAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN SEKOLAH INKLUSI, MELIPUTI: BENTUK AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PESERTA DIDIK
 BERKEBUTUHAN KHUSUS (FISIK, MENTAL, ITELEKTUAL, SENSORIK, GANDA)

Provinsi : Jawa Tengah

No.	Nama Lembaga Penyelenggara Pendidikan Sekolah Inklusi	Bentuk Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang Tersedia	Bentuk Akomodasi diperuntukan untuk Peserta Didik dengan Ragam Disabilitas			
			Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Sensorik
1.	SMA AL FADLLU	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
2.	SMA Islam 1 Surakarta	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
3.	SMA Muhamammadiyah Randublatung Blora	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	-	-	V	-

No.	Nama Lembaga Penyelenggara Pendidikan Sekolah Inklusi	Bentuk Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang Tersedia	Bentuk Akomodasi diperuntukan untuk Peserta Didik dengan Ragam Disabilitas			
			Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Sensorik
4.	SMA Negeri 1 Kendal	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
5.	SMA Negeri 2 Kendal	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	-	-	-	V
6.	SMA Negeri 3 Tegal	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	V
7.	SMA Negeri Mojogedang	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	-	-	V	-
8.	SMA Negeri 4 Pekalongan	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-

No.	Nama Lembaga Penyelenggara Pendidikan Sekolah Inklusi	Bentuk Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang Tersedia	Bentuk Akomodasi diperuntukan untuk Peserta Didik dengan Ragam Disabilitas			
			Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Sensorik
9.	SMA Negeri 1 Batang	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
10.	SMA Negeri 1 Jekulo	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
11.	SMA Negeri 1 Karangreja	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	-	-	-	V
12.	SMA PGRI 1 Kendal	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	V	-
13.	SMA Negeri 2 Batang	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-

No.	Nama Lembaga Penyelenggara Pendidikan Sekolah Inklusi	Bentuk Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang Tersedia	Bentuk Akomodasi diperuntukan untuk Peserta Didik dengan Ragam Disabilitas			
			Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Sensorik
14.	SMA Negeri 1 Jepon	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
15.	SMA Negeri 1 Jatibarang	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
16.	SMA Negeri 3 Brebes	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
17.	SMA Negeri 1 Grobogan	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
18.	SMA Negeri 1 Gabus	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-

No.	Nama Lembaga Penyelenggara Pendidikan Sekolah Inklusi	Bentuk Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang Tersedia	Bentuk Akomodasi diperuntukan untuk Peserta Didik dengan Ragam Disabilitas			
			Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Sensorik
19.	SMA Negeri 1 Subah	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
20.	SMA Negeri 1 Kutowinangun	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
21.	SMA Negeri 1 Pejagoan	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
22.	SMA Negeri 1 Magelang	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
23.	SMA Negri 3 Salatiga	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	V	-

No.	Nama Lembaga Penyelenggara Pendidikan Sekolah Inklusi	Bentuk Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang Tersedia	Bentuk Akomodasi diperuntukan untuk Peserta Didik dengan Ragam Disabilitas			
			Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Sensorik
24.	SMA Negeri 2 Salatiga	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	-	-	V	-
25.	SMA Negeri 1 Mojotengah	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	-	-	-	V
26.	SMK Negeri 1 Ambal	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
27.	SMK Negeri 5 Kendal	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
28.	SMK Negeri 3 Kendal	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-

No.	Nama Lembaga Penyelenggara Pendidikan Sekolah Inklusi	Bentuk Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang Tersedia	Bentuk Akomodasi diperuntukan untuk Peserta Didik dengan Ragam Disabilitas			
			Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Sensorik
29.	SMK Negeri 1 Pekalongan	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	-	-	-	V
30.	SMK Negeri 1 Karanganyar	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	V	-
31.	SMK Negeri 2 Salatiga	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	-	-	V	-
32.	SMK Negeri 3 Salatiga	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	-
33.	SMK Negeri Bansari	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	V	-	-	V

No.	Nama Lembaga Penyelenggara Pendidikan Sekolah Inklusi	Bentuk Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang Tersedia	Bentuk Akomodasi diperuntukan untuk Peserta Didik dengan Ragam Disabilitas			
			Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Disabilitas Intelektual	Disabilitas Sensorik
34.	SMK Negeri 1 Wonosobo	- Memberikan afirmasi seleksi masuk yang sesuai; - Memberikan fleksibilitas pembelajaran; - Memberikan Guru Pembimbing Khusus (GPK).	-	-	-	V

Semarang, 2 Desember 2024

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Sekretaris



Syamsudin Isnaini, S.STP, SH, M.H.
Pembina
NIP. 198007171999121001

FORMAT PELAPORAN AKSI 6 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2024 PERIODE B12
PEMBERIAN BANTUAN ALAT BANTU KEMANDIRIAN DAN AKSESIBILITAS BAGI PANTI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS PERIODE 2024

Provinsi : Jawa Tengah

No.	Nama Penerima Bantuan Alat Bantu	Nama Panti Sosial	Ragam Disabilitas	Bantuan Alat Bantu Kemandirian dan Aksesibilitas/Kebutuhan yang Akan Diterima	Estimasi Tanggal Penerimaan Alat Bantu Kemandiriandan Aksesibilitas
1	Sapto Aprihadi	PPSW Wanodyatama Surakarta	Fisik	Kursi Roda	9 Agustus 2024
2	Rifa Riskomah	PPSW Wanodyatama Surakarta	Fisik	Kursi Roda	9 Agustus 2024
3	Iman	PPSDI Raharjo Sragen	Intelektual	Krek Ketiak	9 Agustus 2024
4	Sapto Aprihadi	PPSW Wanodyatama Surakarta	Fisik	Walker	9 Agustus 2024
5	Siti Saodah	Kota Semarang	Fisik	Kursi Roda	13 Desember 20234
6	Ibu Pariyah	Kota Semarang	Fisik	Kursi Roda	18 Desember 20234
7	Arisetyo	Kabupaten Magelang	Fisik	Kursi Roda	18 Januari 2024
8	Paryoto	Kabupaten Magelang	Fisik	Kursi Roda	18 Januari 2024
9	Sri Rahayu	Kabupaten Magelang	Fisik	Kursi Roda	18 Januari 2024
10	Yance Yohanes	Kota Semarang	Fisik	Kursi Roda	02 Januari 2024
11	Agung Budi Margono	Kota Semarang	Fisik	Kursi Roda	05 Januari 2024

12	Sarmudi	Kabupaten Purbalingga	Fisik	Kursi Roda	15 Januari 2024
13	Aditya Wahyu Saputra	Kabupaten Purbalingga	Fisik	Kursi Roda	15 Januari 2024
14	M. Sholeh	Kabupaten Pemalang	Fisik	Kursi Roda	02 Januari 2024
15	Purwanto	Kabupaten Sukoharjo	Fisik	Kursi Roda	26 Februari 2024
16	Edi Waryanto	Kabupaten Batang	Fisik	Kursi Roda	28 Februari 2024
17	Juwari	Kabupaten Batang	Fisik	Kursi Roda	28 Februari 2024
18	Kasmu'i	Kabupaten Batang	Fisik	Kursi Roda	28 Februari 2024
19	Yayi Destriani	Kabupaten Pekalongan	Fisik	Kursi Roda	20 April 2024
20	Kho Han Lip	Kota Tegal	Fisik	Kursi Roda	14 Mei 2024
21	Mundofiroh	Kabupaten Jepara	Fisik	Kursi Roda	31 Mei 2024
22	Sucipto	Kabupaten Magelang	Fisik	Kursi Roda	19 Juni 2024
23	Reki Priyanto	Kota Semarang	Fisik	Kursi Roda	24 Juni 2024
24	Widiastuti	Kabupaten Magelang	Fisik	Kursi Roda	26 Juni 2024
25	Suwarni	Kabupaten Banjarnegara	Fisik	Kursi Roda	8 Juli 2024
26	Minah	Kabupaten Banjarnegara	Fisik	Kursi Roda	8 Juli 2024
27	Andriyati	Kabupaten Magelang	Fisik	Kursi Roda	18 Juli 2024
28	Asrokin	Kabupaten Tamanggung	Fisik	Kursi Roda	13 Juli 2024

29	Moch. Shokieb Marzuki	Kabupaten Kendal	Fisik	Kursi Roda	24 Juli 2024
30	Tumirah	Kabupaten Jepara	Fisik	Kursi Roda	24 Juli 2024
31	Hardono	Kabupaten Demak	Fisik	Kursi Roda	25 Juli 2024
32	Hj. Siti Solechah	Kabupaten Demak	Fisik	Kursi Roda	25 Juli 2024
33	Sumarati	Kota Semarang	Fisik	Kursi Roda	25 Juli 2024
34	Shodikin	Kabupaten Kendal	Fisik	Kursi Roda	22 Agustus 2024
35	Karwi	Kabupaten Kendal	Fisik	Kursi Roda	22 Agustus 2024
36	Rushadi	Kabupaten Pati	Fisik	Kruk Ketiak	31 Mei 2024
37	Parsidi	Kabupaten Demak	Fisik	Tripod	31 Mei 2024
38	Rochimah	Kabupaten Demak	Fisik	Tripod	31 Mei 2024
39	Retno Indarti	Kota Semarang	Fisik	Tripod	31 Mei 2024
40	Ningsih	Kota Semarang	Fisik	Tripod	31 Mei 2024

Semarang, 4 Desember 2024


 KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Drs. IMAM MASKUR, M. SI
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19690512 199401 1 001

**FORMAT PELAPORAN AKSI 7 PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI TAHUN 2024 PERIODE B12**

**TERSEDIANYA 3 RANCANG BANGUN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS
PERIODE PROYEK 2024-2025**

Provinsi : Jawa Tengah

No	Instansi Pelaksana	Jenis Pembangunan Sarana dan Prasarana	Lokasi	Keterangan (apabila diperlukan)
1.	Dinas Perhubungan	Halte Ramah Disabilitas Pengguna Kursi Roda dan Tunanetra	- Koridor Solo – Wonogiri	- 2 Halte Pengguna Kursi Roda - 3 Halte Tunanetra
			- Koridor Magelang – Purworejo	- 2 Halte Pengguna Kursi Roda - 8 Halte Tunanetra
			- Koridor Semarang – Gubug	- 1 Halte Pengguna Kursi Roda
			- Koridor Semarang – Kendal	- 24 Halte Pengguna Kursi Roda
			- Koridor Semarang – Bawen	- 37 Halte Pengguna Kursi Roda
			- Koridor Purwokerto – Purbalingga	- 61 Halte Pengguna Kursi Roda
2.	Dinas Perhubungan	Terminal Tipe B Penggaron	- Kota Semarang	- Guiding Block - RAMP disabilitas
3.	Dinas Perhubungan	Terminal Tipe B Purwodadi	- Kab. Grobogan	- RAMP disabilitas - Toilet khusus difabel
4.	Dinas Perhubungan	Terminal Tipe B Pilangsari	- Kab. Sragen	- RAMP disabilitas - Toilet khusus difabel - 1 Fasilitas Kursi Roda
5.	Dinas Perhubungan	Terminal Tipe B Madureso	- Kab. Temanggung	- Guiding Block - RAMP disabilitas - Toilet khusus difabel

No	Instansi Pelaksana	Jenis Pembangunan Sarana dan Prasarana	Lokasi	Keterangan (apabila diperlukan)
6.	Dinas Perhubungan	Terminal Tipe B Banjarnegara	- Kab. Banjarnegara	- RAMP disabilitas - 2 Fasilitas Kursi Roda
7.	Dinas Perhubungan	Terminal Tipe B Kutoarjo	- Kab. Purworejo	- Guiding Block - RAMP disabilitas

Semarang, 3 Desember 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710914 199703 1 006